6

PENGEMBANGAN KONSEP AGRIBISNIS

Oleh: Harianto

Periode 1993 - 2003. Pada awal masa Orde Baru, pembangunan bangsa diletakkan pada doktrin Trilogi Pembangunan Nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasilnya, dan stabilitas nasional. Setiap strategi maupun program pembangunan dijiwai dan mengacu pada Trilogi ini. Dalam pembangunan ekonomi upaya perwujudan Trilogi dinyatakan dalam bentuk pembangunan yang berfokuskan pada bidang pertanian primer. Alasan utama meletakkan pertanian sebagai perhatian utama pembangunan adalah pada kenyataan bahwa ekonomi Indonesia memang masih tergantung pada pertanian, baik dalam bentuk peranan pertanian dalam produk domestik maupun penyerapan tenaga kerja.

Selama lebih kurang 20 tahun pembangunan ekonomi di mana pertanian menjadi sektor yang memperoleh perhatian utama, pertumbuhan ekonomi mampu mencapai sekitar 7 persen per tahun, laju inflasi dapat dikendalikan, swasembada beras dicapai, pendapatan per kapita meningkat dari US$ 70 pada tahun 1969 menjadi sekitar US$ 700 pada tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, dan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang berarti. Bersamaan dengan pencapaian pembangunan tersebut, terjadi perubahan struktur perekonomian, di mana kontribusi pertanian dalam produk domestik menurun, sebaliknya peranan industri semakin membesar. Namun perubahan dari sisi kontribusi produk ini tidak disertai dengan perubahan yang nyata pada penyerapan tenaga kerja. Kontribusi pertanian dalam penyerapan tenaga kerja tetap tinggi, sehingga secara implisit dapat dikatakan terjadi penurunan output per tenaga kerja di pertanian.

Perubahan struktur ekonomi tersebut membawa pada perubahan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan secara pasti bergeser menjadi pembangunan industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Penjabaran dari pembangunan industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh inilah yang kemudian menjadi tidak jelas wujudnya, dalam artian jenis industri apa yang ingin dikembangkan?

Apakah industri elektronika, industri pesawat terbang, ataukah industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)? Pertanyaan dasar inilah yang kemudian digeluti oleh pimpinan PSP dan mewarnai pikiran ataupun pendapat PSP. Pimpinan PSP sependapat bahwa titik berat pembangunan ekonomi memang perlu bergeser dari pertanian ke industri. Tetapi industri yang seperti apa yang hendak dikembangkan agar sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, yaitu industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh?

Ada tiga mazhab pilihan strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia. Ketiga pilihan strategi tersebut adalah: strategi industrialisasi berspektrum luas, strategi industrialisasi dengan industri teknologi tinggi, dan strategi industrialisasi pertanian atau sering disebut pembangunan agribisnis. Masing-masing mazhab ini diperkirakan akan terus mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

Strategi industrialisasi berspektrum luas (*broad-based industry strategy*) tidak membedakan apakah jenis industri yang dikembangkan berakar pada bahan baku dalam negeri ataukah bahan baku dari luar negeri atau impor (*footlose industry*). Strategi industrialisasi ini mulai berkembang sejak akhir 1980-an, yang ternyata lebih banyak melahirkan industri yang bersifat *footlose* di Indonesia. Berbagai kelemahan dapat dikemukakan pada strategi industrialisasi yang melahirkan industri yang tergantung pada bahan baku impor ini.

Dalam pelaksanaannya, strategi industrialisasi yang mengandalkan pada bahan baku impor ternyata melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat tidak netral, dan bahkan cenderung bersifat *trade-off*. Untuk mendukung industri diperlukan iklim usaha yang kondusif dalam bentuk proteksi. Proteksi diberikan dalam bentuk kebijakan tarif maupun non-tarif. Kebijakan tarif yang dikenakan secara industri spesifik memang tidak menimbulkan *trade-off* dengan industri lainnya, tetapi menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Sebaliknya kebijakan non-tarif tidak semuanya netral. Untuk memberikan dukungan dan proteksi terhadap industri berbahan baku impor ini, maka nilai tukar Rupiah secara artifisial dinilai tinggi (*artificially overvalued exchange rate*). Dengan nilai mata uang Rupiah yang kuat tersebut, maka secara relatif harga bahan baku impor yang diperlukan industri menjadi murah. Namun kebijakan ini membawa akibat sulit berkembangnya industri-industri yang berorientasi ekspor yang berbasiskan pada sumberdaya domestik.

Terhambatnya perkembangan industri yang berbasiskan sumberdaya domestik berarti juga terhambatnya ekonomi yang menyangkut kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Industri yang bersifat *footlose* ini umumnya dikuasai oleh pengusaha dengan modal kuat dan berpusatkan di kota-kota besar, sehingga menyebabkan semakin buruknya kondisi distribusi pendapatan dan ketimpangan pembangunan kota-desa. Lebih jauh lagi, pembangunan industri yang terjadi ternyata menyebabkan terjadinya aliran sumberdaya dan kesejahteraan keluar pertanian atau dari desa ke kota.

Strategi industrialisasi yang kedua, industri teknologi tinggi, ide dasarnya adalah Indonesia harus mengembangkan industri teknologi tinggi yang tidak banyak dikembangkan oleh negara-negara di Asia Timur. Memang pada kenyataannya, industri yang dikembangkan adalah industri pesawat terbang, industri perkapalan, dan industri lain-lain yang disebut sebagai industri strategis. Cukup banyak sumberdaya negara yang mengalir bagi penerapan strategi industrialisasi ini.

Terdapat berbagai kelemahan dari strategi industrialisasi yang berbasiskan teknologi tinggi yang disebut sebagai industri strategis ini. Pengembangan strategi ini memerlukan sumberdaya manusia yang bermutu tinggi dari sisi pendidikan dan keterampilan, yang justru belum dapat dipenuhi oleh sumberdaya manusia yang ada di Indonesia. Industri yang dipilih ternyata juga tidak memiliki industri pendukungnya, sehingga ketergantungan pada impor tinggi. Lebih jauh lagi, pembangunan industri ini memiliki resiko yang besar dipandang dari sisi persaingan pasar maupun besarnya nilai investasi yang dibutuhkan, apalagi dana yang digunakan adalah dana rakyat.

Agribisnis

Strategi yang ketiga, yang merupakan pandangan PSP, adalah strategi industrialisasi pertanian. Industri yang seharusnya dikembangkan adalah industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, yang sering juga disebut agroindustri. Agroindustri selayaknya dikembangkan sebagai basis pengembangan industri di Indonesia ke depan. Namun agroindustri sulit untuk berkembang apabila tidak didukung oleh pertanian primer sebagai penghasil bahan baku. Pertanian primer tidak akan berkembang apabila tidak disokong oleh pengembangan industri-industri yang menghasilkan sarana produksi. Dan keseluruhan ini, yaitu agroindustri, pertanian primer dan industri sarana produksi, tidak dapat berkembang jika tidak ada dukungan dari penyedia jasa pendukung, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian, penyuluhan, maupun pendidikan. Dengan demikian, pembangunan industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh pada dasarnya adalah pembangunan agribisnis.

Pembangunan agribisnis yang dimaksud adalah pembangunan agribisnis sebagai satu kesatuan sistem secara simultan dan harmonis. Pembangunan agribisnis dengan demikian melingkupi pembangunan subsistem agribisnis hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi pertanian seperti industri benih atau bibit, industri agrokimia, dan industri agrootomotif; pembangunan subsistem agribisnis usahatani atau primer (*on-farm*), yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi pertanian untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; subsektor agribisnis hilir, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk-produk olahannya, baik sebagai produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan pemasaran atau perdagangannya; subsektor agribisnis pendukung, yaitu kegiatan yang menghasilkan atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh subsistem-subsistem agribisnis lainnya, misalnya perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, maupun penyuluhan dan jasa konsultan.

Pembangunan agribisnis sebagai suatu sistem merupakan cara baru untuk memandang pembangunan pertanian maupun pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Berbagai masalah pembangunan, seperti peningkatan pendapatan, pembukaan kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, masalah kelestarian lingkungan, dan lain-lainnya, dapat dipecahkan melalui pembangunan sistem agribisnis. Dengan demikian strategi industrialisasi melalui pembangunan sistem agribisnis akan sesuai dengan jiwa Trilogi pembangunan.

Pandangan bahwa pembangunan ekonomi nasional yang sesuai bagi Indonesia ke depan adalah membangun sistem agribisnis yang kuat merupakan tema sentral PSP dalam kurun waktu sepuluh tahun

(1993-2003). Berbagai aspek di sekitar pertanyaan, apa, mengapa, dan bagaimana sistem agribisnis hendaknya dibangun menjadi bahan diskusi dan perdebatan yang mewarnai perjalanan PSP sebagai salah satu lembaga penelitian di IPB. Aspek yang dibahas seputar pembangunan agribisnis cukup luas, mulai dari komoditas atau sumberdaya yang dapat dijadikan basis pembangunan, kelembagaan yang diperlukan, sampai pada keterkaitan kebijakan ekonomi makro dengan pengembangan agribisnis di Indonesia.

Agribisnis memiliki basis pengembangan yang luas di Indonesia, baik ditinjau dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, basis pengembangan sistem agribisnis dapat dilihat pada: (a) Indonesia memiliki sumberdaya dasar agribisnis seperti iklim tropis, keanekaragaman hayati, yang ada di darat maupun perairan. Kekayaan sumberdaya hayati yang dimiliki ini dapat menghasilkan produk agribisnis mulai dari bahan pangan, farmasi, sampai pada produk bio-kimia lainnya dalam jumlah dan jenis yang besar. (b) Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang berupa sumberdaya perairan seluas 5 sampai 7 juta km^2 dan garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sekitar 91 000 kilometer. Sumberdaya perikanan ini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masa depan. (c) Indonesia memiliki komoditas perkebunan di mana beberapa komoditas diperkirakan Indonesia menjadi produsen penting, seperti kelapa sawit, coklat, karet, kopi, teh, dan lain-lainnya. (d) Pada komoditas peternakan, khususnya peternakan ayam, Indonesia juga memiliki potensi yang besar dan dapat menjadi produsen penting dunia. (e) Indonesia memiliki potensi sumberdaya manusia, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan yang belum termanfaatkan secara optimal. Keseluruhan potensi sumberdaya di atas dapat dijadikan basis pengembangan sistem agribisnis di Indonesia.

Sedangkan dari sisi permintaan pembangunan agribisnis juga memiliki prospek yang baik. Berbagai alasan dapat dikemukakan mengapa pembangunan agribisnis merupakan arah yang tepat apabila dipandang dari sisi permintaan. Sampai saat ini konsumsi per kapita produk pangan agribisnis di Indonesia masih termasuk terendah di dunia. Kecuali konsumsi beras, konsumsi per kapita penduduk Indonesia terhadap komoditas ikan, susu, daging, buah-buahan, dan lain-lainnya masih relatif rendah. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka konsumsi komoditas-komoditas tersebut dapat diperkirakan akan terus meningkat. Pasar produk agribisnis di pasar internasional masih besar. Apabila agribisnis Indonesia dapat dibangun agar efisien dan memiliki karakteristik yang disukai konsumen, maka pasar akan semakin terbuka lebar menjelang semakin bebasnya perdagangan dunia. Perdagangan yang semakin bebas diharapkan juga berarti semakin dikuranginya subsidi-subsidi pertanian yang selama ini ada di negara-negara maju dan kaya, sehingga produk agribisnis Indonesia diharapkan juga dapat berkompetisi di pasar dunia. Meningkatnya industrialisasi yang tidak berbasiskan pertanian di negara-negara yang sempit wilayahnya akan mengurangi produk pertanian di negara-negara tersebut, yang berarti juga dapat meningkatnya pasar produk agribisnis bagi negara lain, termasuk Indonesia.

Struktur dan Kebijakan

Dari sudut pandang kelembagaan, struktur agribisnis di Indonesia untuk hampir semua komoditas masih tersekat-sekat. Struktur yang tersekat-sekat ini tentunya menjadi penghambat utama pembangunan agribisnis di Indonesia. Struktur agribisnis yang tersekat-sekat ini dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, subsistem agribisnis hulu (produksi dan perdagangan sarana produksi pertanian) dan subsistem agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan perdagangannya) dikuasai oleh pengusaha menengah dan besar yang bukan petani. Petani sepenuhnya hanya bergerak pada subsistem agribisnis penghasil produk primer. Kedua, antar subsistem agribisnis tidak ada hubungan organisasi fungsional dan hanya diikat oleh hubungan pasar produk antara yang juga tidak sepenuhnya kompetitif. Ketiga, adanya asosiasi pengusaha yang bersifat horizontal dan cenderung berfungsi sebagai kartel. Berbagai asosiasi pengusaha ini dapat ditemui pada subsistem agribisnis hulu maupun subsistem agribisnis hilir. Keempat, agribisnis dilayani oleh paling sedikit lima departemen teknis (Pertanian, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan PPK). Berbagai departemen ini tentunya memiliki visi ataupun mandat yang berlainan, sehingga berbagai kebijakan yang ditujukan pada agribisnis belum tentu integratif dan selaras satu dengan lainnya dipandang dari sudut agribisnis sebagai suatu sistem.

Struktur agribisnis yang tersekat-sekat tersebut akan menyulitkan upaya pembangunan pertanian yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani. Porsi ekonomi petani yang terbatas pada subsistem agribisnis usahatani menjadikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya relatif kecil. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk itu, yaitu: (a) Dalam sistem agribisnis, nilai tambah yang terbesar berada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir. (b) Petani berada di antara dua kekuatan eksploitasi ekonomi, yaitu pada pasar sarana produksi petani menghadapi kekuatan monopolistik, sedangkan pada pasar produk primer (output) petani menghadapi pasar yang cenderung bersifat monopsonistik. Petani dalam menghadapi kedua pasar tersebut selalu dalam posisi yang kalah. Keadaan yang demikian ini menyebabkan upaya-upaya peningkatan produktivitas di tingkat petani tidak secara otomatis berarti peningkatan pendapatan. Manfaat pengembangan telnologi baru, pengembangan infrastruktur pedesaan, subsidi harga sarana produksi, dan subsidi melalui perkreditan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usahatani relatif sedikit manfaatnya yang jatuh pada petani.

Permasalahan struktural yang dihadapi agribisnis tersebut juga berakibat pada lemahnya daya saing agribisnis. Struktur agribisnis yang tersekat-sekat dapat menciptakan masalah transmisi dan masalah marjin ganda. Masalah transmisi ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti misalnya transmisi harga yang tidak simetris, informasi perubahan preferensi konsumen yang tidak dapat sampai dengan baik ke arah subsistem hulunya, serta adanya inkonsistensi mutu produk sejak dari hulu sampai ke hilir dalam sistem agribisnis. Lebih jauh lagi, struktur yang tersekat-sekat menjadikan inovasi berjalan lambat di setiap subsistem agribisnis. Sedangkan marjin ganda di agribisnis terjadi melalui praktek penetapan harga yang jauh di atas harga pada kondisi kompetitifnya di setiap subsistem yang tersekat-sekat tersebut. Dampak nyata dari marjin ganda ini adalah harga pokok penjualan produk akhir agribisnis menjadi relatif tinggi, sehingga daya saingnya menjadi rendah. Masalah transmisi dan masalah marjin ganda juga berdampak buruk bagi investasi di bidang agribisnis, karena masalah tersebut dapat menyebabkan naiknya resiko usaha.

Penataan dan pengembangan struktur agribisnis nasional perlu diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu: Pertama, mengembangkan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti aliran produk. Struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal ini memungkinkan subsistem agribisnis dari hulu sampai hilir dikelola dengan efisien dan saling mendukung satu subsistem dengan subsistem lainnya. Intergrasi vertikal akan memudahkan penerapan sistem manajemen yang ditujukan pada peningkatan daya saing dan peningkatan kualitas. Kedua, mengembangkan organisasi bisnis petani agar mampu memperoleh nilai tambah yang ada di subsistem hulu maupun hilir dari sistem agribisnis. Secara individu petani akan sulit merebut nilai tambah tersebut.

Keberhasilan pembangunan agribisnis di Indonesia ditentukan juga oleh arah kebijakan ekonomi makro. Pembangunan yang diarahkan pada industrialisasi yang tidak memiliki basis sumberdaya yang kuat, seperti industri substitusi impor, sering melahirkan kebijakan-kebijakan makro yang menghambat perkembangan agribisnis. Berbagai kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk menopang industrialisasi yang kemudian secara langsung atau tak langsung menyebabkan distorsi harga yang menghambat perkembangan agribisnis.

Kebijakan nilai tukar Rupiah yang secara artifisial dibuat kuat, yaitu sebelum Indonesia mengalami krisis moneter, merupakan salah satu contoh bagaimana kebijakan ekonomi makro dapat menghambat agribisnis. Nilai tukar Rupiah yang dibuat kuat akan menguntungkan industri-industri yang menggunakan bahan baku dari impor untuk dipasarkan di pasar domestik. Sebaliknya bagi industri atau sektor yang menggunakan bahan baku domestik dan diarahkan untuk pasar ekspor, kuatnya nilai tukar mata uang dapat menyebabkan daya saingnya melemah. Agribisnis pada dasarnya menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri dan banyak produknya yang dimaksudkan juga untuk melayani pasar internasional, sehingga nilai tukar Rupiah yang secara artifisial dibuat kuat merugikan pembangunan agribisnis.

Kebijakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi pada industri yang bersifat substitusi impor ternyata memberikan dampak juga pada perkembangan agribisnis. Proteksi yang berlebihan yang diberikan pada industri-industri tertentu dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumberdaya. Industri-industri yang memperoleh proteksi menjadi tampak lebih menarik di mata investor, sedangkan industri yang termasuk ke dalam agribisnis dianggap kurang menguntungkan, dan juga berusaha di bidang agribisnis dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi. Akibatnya, sumberdaya kemudian lebih banyak mengalir ke industri-industri yang memperoleh proteksi dan bidang usaha agribisnis yang memiliki basis kuat sebaliknya mengalami kesulitan memperoleh modal untuk investasi ataupun usaha. Kebijakan industrialisasi berspektrum luas ataupun industrialisasi substitusi impor yang selama ini diterapkan menimbulkan struktur insentif yang diskriminasi yang merugikan pembangunan agribisnis dan pertanian penghasil produk primer.

Kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk menopang industrialisasi yang dilakukan ternyata tidak saja berdampak negatif bagi perkembangan agribisnis, melainkan juga berdampak pada menguatnya ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Berbagai infrastruktur yang dibangun lebih diarahkan untuk menopang strategi industrialisasi yang ditujukan untuk substitusi impor. Industri-industri ini umumnya berlokasi di perkotaan atau daerah sekitar perkotaan. Berbagai sarana dan pra-sarana transportasi dan telekomunikasi dibangun untuk memperlancar dan mempermudah jalannya bisnis industri ini. Akibatnya, perkembangan fasilitas publik di perkotaan jauh melampaui yang dibangun untuk daerah pedesaan.

Kebijakan industrialisasi yang bersifat spektrum luas maupun industri substitusi impor umumnya bertumpu pada upah tenaga kerja yang murah. Upah tenaga kerja ini sering dikaitkan dengan kebutuhan hidup minimum. Dengan demikian agar upah dapat tetap rendah, maka harga-harga berbagai kebutuhan pokok (pangan) harus dijaga tetap rendah. Keadaan ini tentu membuat pembangunan yang dilakukan semakin bias ke perkotaan dan mendiskriminasi pedesaan dan agribisnis.

Yang Telah dan Belum Dicapai

Pemikiran yang dilancarkan Pusat Studi Pembangunan selama Periode 1993 sampai kini ternyata tidak sia-sia. Agribisnis telah menjadi istilah atau kata yang sangat populer di pusat pemerintahan sampai di pedesaan. Berbagai seminar, lokakarya, ataupun diskusi baik di pusat maupun di daerah yang menyangkut pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian, senantiasa memunculkan agribisnis dalam pembicaraannya. Meskipun istilah agribisnis mungkin diartikan berbeda-beda bagi pembicaranya, konsep agribisnis telah menyadarkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya sebatas pada masalah-masalah di tingkat usahatani (*on-farm*) tetapi lebih luas lingkupnya dan saling mengait antar subsistem yang ada.

Pembangunan di tingkat usahatani akan sulit berhasil jika pembangunan subsistem-subsistem lain dalam sistem agribisnis terabaikan.

Agribisnis sebagai konsep pembangunan yang terus dipasarkan oleh pimpinan PSP ternyata memiliki dampak yang cukup besar di bidang akademik, khususnya di IPB. Berbagai mata-ajaran yang bertemakan agribisnis muncul dan minat mahasiswa untuk mendalami agribisnis meningkat dengan pesat. Program Studi Agribisnis yang ada di Fakultas Pertanian menjadi program studi yang paling diminati oleh calon mahasiswa yang ingin memasuki IPB, sehingga tidak mengherankan jika persaingan untuk memasuki program studi ini relatif tinggi.

Pemikiran Pusat Studi Pembagunan pada Periode 1993 sampai kini tidak hanya sebatas pada pengembangan konsep agribisnis. Berbagai pemikiran dan penelitian yang terkait dengan pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian juga dieksplorasi. Pertama, berbagai penelitian yang terkait dengan pengembangan program transmigrasi. Penelitian transmigrasi ini lebih banyak mengarah pada apa yang perlu dilakukan agar kesejahteraan para transmigran yang telah ada di lokasi dapat ditingkatkan. Kedua, Pusat Studi Pembangunan bekerjasama dengan Deperindag secara konsisten mendorong terbentuknya pasar lelang komoditas di berbagai daerah sentra produksi perkebunan ataupun pertanian. Pasar lelang merupakan salah satu bentuk kelembagaan pemasaran yang diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani serta memperbaiki arus informasi yang dapat diakses petani. Melalui pasar lelang diharapkan transparansi harga lebih mudah terjadi dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kuntitas maupun kualitas produk yang dipasarkan petani. Ketiga, PSP melakukan berbagai studi bekerjasama dengan Deptan dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan wilayah. Ada daerah-daerah yang selama ini kurang tergali potensi sumberdayanya akibat adanya berbagai kendala. PSP melakukan identifikasi permasalahan dan merumuskan alternatif untuk mengatasi masalah serta merumuskan arah pembangunan daerah tersebut ke depan. Keempat, berbagai studi yang terkait dengan kelembagaan pangan dan ketahanan pangan juga dilakukan PSP selama periode tersebut bekerjasama dengan berbagai institusi.

Pusat Studi Pembangunan secara aktif memasarkan pemikirannya melalui seminar, diskusi, maupun lokakarya baik yang dilakukan di dalam ataupun di luar kampus serta melalui berbagai media masa. Sampai tahun 2000 secara berkala pimpinan PSP mengisi rubrik Suara Dari Bogor yang ada di harian Suara Pembaruan. Melalui tulisan di harian tersebut setiap minggu sekali dinyatakan pikiran-pikiran PSP tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pembangunan pertanian, agribisnis, pangan, maupun pedesaan. Publik diharapkan dapat mengetahui pendapat PSP dari tulisan-tulisan di media masa.

Seminar, diskusi, dan lokakarya dilaksanakan oleh PSP tidak hanya sebatas membahas tentang agribisnis ataupun pemikiran PSP, melainkan juga memfasilitasi pihak-pihak yang ingin atau seharusnya pendapatnya diketahui oleh publik atau pihak-pihak lain yang juga berkepentingan. Seperti misalnya, PSP mempertemukan pihak PT Inti Indo Rayon dengan perwakilan masyarakat yang keberatan dengan keberadaan pabrik tersebut. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari permasalahan yang terjadi antara suatu perusahaan dengan masyarakat. Pro dan kontra mewarnai perdebatan di berbagai aspek yang dibahas. Ketidak sepakatan tentang suatu aspek tidak saja terjadi antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya, tetapi juga antar ahli. Seperti misalnya, perdebatan tentang seberapa jauh atau seberapa besar pabrik yang didirikan memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya, ternyata pendapat ahli dapat berbeda sangat besar antar satu dengan lainnya. Tinjauan kritis dan akademis terhadap aspek dampak lingkungan dari pendiriaan pabrik yang dimaksud pada akhirnya tidak ada kesimpulan yang dapat disepakati. Dari pengalaman PSP menyediakan forum dialog ataupun debat tentang suatu permasalahan, dapatlah diambil pelajaran bahwa pada akhirnya unsur subyektivitas dari pihak-pihak yang terlibat menjadi faktor yang sangat menentukan. Berbagai data (fakta empiris) dapat dikemukakan untuk menopang argumentasi pembenaran, namun menjadi tidak ada maknanya jika ada pihak yang sejak semula sudah merasa diperlakukan tidak adil.

Penelitian dengan beragam topik dan masalah telah dilakukan oleh PSP. Demikian juga telah banyak pemikiran yang diungkapkannya melalui tulisan maupun lisan. Konsep agribisnis telah dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun ada topik yang sampai sekarang belum dikaji dengan dalam, yaitu mengenal lebih baik petani sebagai rumahtangga dan sekaligus sebagai produsen. Pengetahuan tentang petani secara utuh tidak mengalami peningkatan di PSP selama periode ini.

Petani di Indonesia tidaklah homogen ditinjau dari karakteristiknya. Ada petani yang dapat digolongkan sebagai petani komersial, di mana ia menghasilkan produk untuk sepenuhnya dijual ke pasar. Pada sisi yang lain, ada petani yang digolongkan sebagai petani yang subsisten ataupun semi-subsisten, di mana tidak seluruh produk yang dihasilkannya untuk keperluan dijual ke pasar melainkan sebagiannya untuk keperluan konsumsi sendiri. Perilaku pengambilan keputusan kedua golongan petani ini diperkirakan dapat saja berbeda, sehingga reaksi petani terhadap suatu kebijakan pemerintah mungkin saja berbeda di antara petani dengan karakteristik yang berbeda. Bagi petani subsisten ataupun semi-subsisten, keputusannya sebagai rumahtangga mungkin tidak dapat dipisahkan dengan keputusan petani sebagai produsen. Dengan demikian analisis sosial-ekonomi rumahtangga petani di Indonesia perlu terus dikembangkan. Tanpa adanya pengetahuan yang tepat terhadap perilaku petani di Indonesia, maka akan sulit diharapkan kebijakan apapun yang ditujukan bagi petani dapat mencapai tujuannya.

Pembangunan agribisnis di Indonesia di masa mendatang menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Proses globalisasi dalam perekonomian, yang disertai dengan kesadaran demokrasi yang meningkat, membawa konsekueni berbeda dalam praktek pembangunan maupun dalam praktek bisnis. Tuntutan akan peningkatan efisiensi yang disertai dengan tuntutan pemerataan keadilan menjadikan konsep-konsep agribisnis yang telah dikumandangkan pada masa lalu perlu terus diperbaharui. Perusahaan-perusahaan agribisnis, yang umumnya bersentuhan langsung dengan usaha petani skala kecil, perlu mempertajam maupun mempraktekkan *good corporate govermance* agar dapat *sustain* dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pengembangan konsep agribisnis maupun konsep pembangunan agribisnis di masa datang perlu lebih menekankan pada aspek kelembagaan dan aspek *govermance* dan *responsibility* dari pihak-pihak yang ada di dalamnya, petani, perusahaan, dan pemerintah.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh PSP pada periode ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (periode 1983-1991) adalah tidak didapatnya dana penelitian yang bersifat *multi-years* yang memungkinkan diadakannya kajian yang bersifat mendalam untuk suatu permasalahan. Pentingnya pendanaan penelitian yang bersifat jangka panjang ini dapat dilihat pada penelitian tentang peranan wanita maupun penelitian tentang pengembangan kelembagaan pangan (misalnya, pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi). Penelitian yang pendanaannya untuk beberapa tahun ini ternyata dapat menghasilkan konsep dan juga pembelajaran yang berharga yang jejaknya masih terus terasa sampai saat ini. Dana penelitian yang *multi-years* memungkinkan penelitian tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan sampai pada *pilot-project* yang dapat membuktikan konsep yang dibuat dapat diterapkan atau tidak.